

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

*Illegal Unregulated Unreported (IUU) fishing* sudah menjadi fenomena global dalam dunia perikanan. Berdasarkan data dari *United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)* pada tahun 2003 75% dari total keseluruhan perikanan dunia sudah pada keadaan tereksplorasi sepenuhnya (*fully exploited*), tereksplorasi secara berlebihan (*overexploited*), ataupun habis (*depleted*).<sup>1</sup> Untuk dapat menjaga ketersediaan ikan di dunia, beberapa negara dan juga organisasi internasional sudah mengimplementasikan usaha konservasi dan juga manajemen untuk mencegah kegiatan – kegiatan yang akan mengancam ketersediaan ikan. Usaha pembatasan dan penjagaan ini perlu dilakukan karena selama ini kegiatan – kegiatan penangkapan ikan hanya berlandaskan ekonomi dan hanya memikirkan keuntungan sementara tanpa memikirkan aspek jangka panjang sosial, ekonomi dan lingkungan.<sup>2</sup> Kegiatan – kegiatan yang hanya berorientasi ekonomi inilah yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran dalam kegiatan penangkapan ikan.

Meskipun secara umum disebut dengan IUU *fishing*, tentu saja terlebih dahulu perlu kita pahami bagaimana pembagian IUU *fishing*. *Illegal fishing* adalah kapal penangkap ikan yang beroperasi melanggar hukum perikanan. Tindakan – tindakan yang termasuk ke dalam *illegal fishing* adalah menangkap ikan tanpa izin ataupun

---

<sup>1</sup> Environmental Justice Foundation (EJF), *Pirates And Profiteers - An International Campaign Against Illegal Fishing* (London: The Environmental Justice Foundation. 2005) hal 4.

<sup>2</sup> Ibid hal 4.

melanggar ketentuan yang ada. Definisi ini mengikat seluruh kegiatan penangkapan ikan baik dalam yuridiksi negara maupun sesuai dengan yang telah diatur oleh *Regional Fisheries Management Organizations (RFMO)*.<sup>34</sup>

Sedangkan kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau menyembunyikan data yang sebenarnya kepada otoritas negara adalah *unreported fishing*, sebagaimana seharusnya kegiatan penangkapan ikan itu harus dilaporkan kepada negara di mana penangkapan ikan dilakukan dan juga kepada RFMO terkait. Sehingga penangkapan ikan tersebut tidak sesuai dengan regulasi nasional dan juga internasional.<sup>5</sup>

Selanjutnya yang terakhir, semua kegiatan penangkapan ikan di wilayah yang kurang diketahui keadaannya sehingga belum adanya upaya manajemen dan konservasi di wilayah tersebut disebut dengan *unregulated fishing*. Kapal penangkap ikan haruslah melakukan kegiatan menangkap ikan sesuai dengan manajemen dan konservasi RFMO serta hukum internasional. Kegiatan menangkap ikan diluar wilayah yang diatur oleh RFMO ataupun hukum internasional akan dianggap sebagai kegiatan *unregulated fishing*. Pelaku *unregulated fishing* ini lebih mengarah kepada

---

<sup>3</sup> Tertuang dalam FAO (2001) *International Plan of Action to prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing*. FAO, Rome.

<sup>4</sup> RFMO: Secara umum, RFMO bergerak pada prinsip untuk membangun perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dan perannya adalah mengelola konservasi sumber daya perikanan. Pengertian diambil pada Victor P. H. Nikijuluw. *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal: Blue Water Crime*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2008. Hlm 162.

<sup>5</sup> Ibid.

kapal tanpa kewarganegaraan ataupun kapal yang berasal dari negara yang tidak bergabung dengan RFMO terkait di mana mereka memancing.<sup>6</sup>

Sebagai negara bahari sekaligus negara maritim Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam lautnya, di mana tercatat sebanyak 50% spesies ikan dunia dan 75% spesies terumbu karang dunia ada di perairan Indonesia.<sup>7</sup> Karena gugusan pulauanya yang subur dan letaknya yang strategis, yaitu berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, ditambah lagi Indonesia juga diapit oleh dua Samudera yaitu Samudera Hindia di bagian Barat dan Samudera Pasifik di bagian Timur. Kekayaan sumber daya perikanan Indonesia sangat diminati banyak negara di dunia, sekarang ini produk perikanan Indonesia mampu menembus lima besar, dibawah Kanada, Tiongkok, Cile, dan Thailand.<sup>8</sup>

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia terus mengalami peningkatan. Sesuai dengan tabel 1.1 di bawah ini menjelaskan bahwa potensi sumber daya perikanan Indonesia masih sangat baik, dibuktikan dengan pencapaian surplus perdagangan sebesar 0,23 % pada akhir tahun 2013.<sup>9</sup>

---

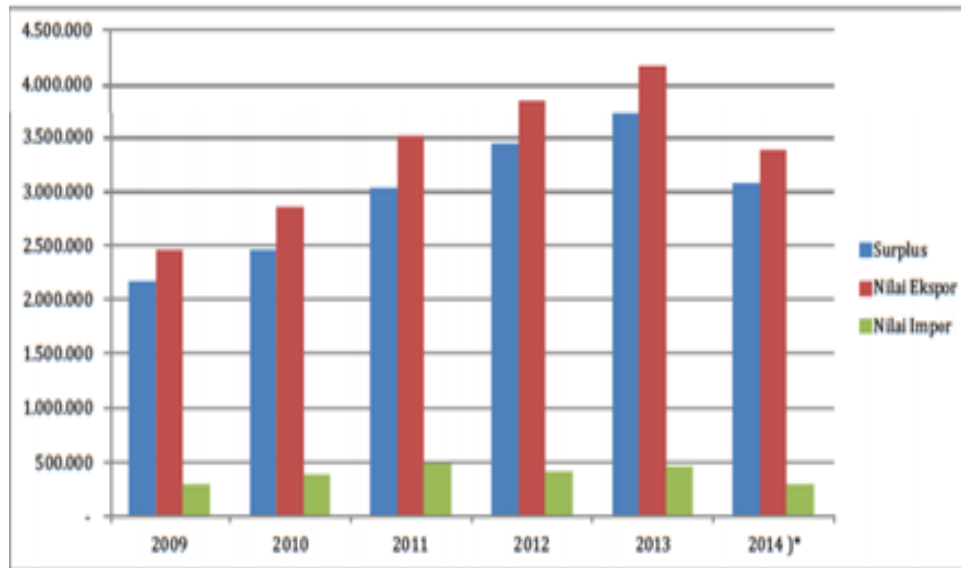
<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Efri Yoni Baikoeni, *Patriot Negara Kepulauan* (Jakarta: Pandu Aksara. 2014) Hal 67.

<sup>8</sup> E.H Allagan, Kepala Pusat Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut, Bakorkamla, Jakarta, Tabloid Diplomasi No.10 hal 8.

<sup>9</sup> Pusat Data Statistik Dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Data Pokok Kelautan Dan Perikanan 2014* (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. 2014).

Grafik 1.1 Neraca Perdagangan Hasil Perikanan Indonesia Periode 2009 – 2014



Sumber : *Data Pokok Kelautan Dan Perikanan 2014*. Pusat Data Statistik Dan Informasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Pada grafik diatas neraca perdagangan menunjukkan surplus perdagangan yang mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen dibandingkan tahun 2012 atau sebesar US\$3,7 juta, namun kenaikan ini masih di bawah kenaikan rata – rata selama lima tahun yang mencapai 14,63 persen.<sup>10</sup>

Besarnya potensi sumber daya perikanan Indonesia inilah yang kemudian menjadi sebuah ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Di mana semakin berlimpahnya hasil perikanan di lautan Indonesia, semakin meningkat pula kasus-kasus IUU *fishing*. Kegiatan IUU *fishing* yang sering terjadi di Indonesia adalah penangkapan ikan tanpa izin termasuk di dalamnya izin palsu, penangkapan dengan menggunakan

<sup>10</sup> ibid

alat tangkap yang dilarang, penangkapan jenis yang dilarang ataupun tidak sesuai izin, pemalsuan data tangkapan bahkan tidak dilaporkan, membawa langsung tangkapan ke negara lain, memanipulasi persyaratan surat keterangan penghapusan kapal dan kontrak jual beli kapal, bendera ganda, memakai jasa ABK asing melebihi batas yang telah ditetapkan, kapal perikanan berganti – ganti nama dan nomor kapal.<sup>11</sup>

Kegiatan ini tentu saja berdampak besar terhadap semua sektor kehidupan yang ada di Indonesia. Dari sisi ekonomi IUU *fishing* telah merugikan Indonesia begitu besar, Indonesia telah dirugikan sangat besar akibat aktivitas ini mencapai Rp101,04 triliun per tahun.<sup>12</sup> Jika dilihat dari sisi sosial kegiatan ini tentu saja akan mengancam kehidupan nelayan yang kalah saing dengan kapal – kapal penangkap ikan skala besar serta mengganggu aktivitas menangkap ikan mereka serta mengancam kesempatan kerja bagi nelayan lokal karena menggunakan ABK asing. Belum lagi kegiatan ini juga akan memacu nelayan untuk mencari mata pencaharian baru termasuk kegiatan yang melanggar perundang – undangan. Dari sisi lingkungan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta penangkapan yang tidak sesuai dengan aturan tentu saja akan merusak ekosistem yang ada.<sup>13</sup>

IUU *fishing* semakin sulit diatasi oleh pemerintah Indonesia secara perseorangan dikarenakan banyaknya faktor eksternal yang mendukung terjadinya

---

<sup>11</sup> Ibid hal 101.

<sup>12</sup> Driyandono, "Fakta-fakta Seputar Pencurian Ikan". 1 November 2014. Diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2014/11/01/090618747/fakta-fakta-seputar-pencurian-ikan> pada 27 Maret 2016.

<sup>13</sup> Pusat Data Statistik Dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Data Pokok Kelautan Dan Perikanan 2014* (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. 2014) Hal 102.



IUU *fishing*. Terdapatnya negara – negara yang tidak memiliki wilayah pantai atau laut (*land-locked states*) namun memiliki kebutuhan ikan laut seperti Laos membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan produk ikan lautnya, sehingga menciptakan peluang bagi kapal penangkapan ikan untuk menangkap ikan lebih banyak bahkan melanggar aturan yang telah ditetapkan demi mendapatkan keuntungan yang lebih. Belum lagi terdapat negara dengan kemampuan menangkap ikan yang baik namun tidak diimbangi dengan stock ikan yang ada di wilayah negaranya seperti Thailand yang mendorong nelayannya untuk memancing ke wilayah Indonesia.<sup>14</sup> Ditambah lagi dengan pengawasan yang hanya dilakukan satu pihak, perjanjian perbatasan yang belum diselesaikan, serta tidak semua negara di sekitar Indonesia yang juga ikut serta dalam organisasi penanggulangan IUU *fishing* yang diikuti Indonesia semakin memperumit penanganan masalah ini.<sup>15</sup>

Pasal 62 ayat (2) UNCLOS menjelaskan bahwa negara pantai harus menjelaskan kemampuan negaranya dalam memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan kepada daya tangkap nelayan domestik negara pantai. Ayat 2 UNCLOS selanjutnya menjelaskan sisa sumber daya alam yang tidak dapat dimanfaatkan oleh sumber daya manusia dalam negeri harus memberikan kesempatan pada negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan yang masih tersisa. Hal ini diwujudkan melalui kerjasama antar negara yang bertanggung jawab, bukan hanya

---

<sup>14</sup> Dewi Indira Biasane. *Kerja Sama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)*. (Jakarta: Pustaka UI. 2009) hal 3.

<sup>15</sup> Syamsumar Dam, *Politik Kelautan* (Jakarta: Bumi Aksara. 2010) Hal 46.

izin pemanfaatan namun juga harus diiringi oleh kerjasama penjagaan terhadap sumber daya alam yang akan dimanfaatkan.<sup>16</sup>

Pemerintah Indonesia sendiri sudah beberapa kali melakukan kerjasama perikanan dengan negara lain, sebagai contoh pada tanggal 23 Februari 2006 telah terjadi penandatanganan MOU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina dalam Kerjasama Perikanan dan Kelautan (*MOU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation*) dengan salah satu fokusnya yaitu terkait permasalahan pemberantasan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di perbatasan kedua Negara tersebut.<sup>17</sup> Kerjasama sejenis tentu saja perlu ditingkatkan oleh Indonesia baik bilateral maupun multilateral dan juga kerjasama – kerjasama dengan RFMO – RFMO yang memiliki tujuan sama yaitu penanganan IUU *Fishing*.

Banyak masalah yang dihadirkan akibat dari IUU *fishing* ini serta sulitnya penanganannya jika hanya dilakukan secara terpisah oleh masing – masing negara menuntut semua negara untuk turut serta bekerjasama dalam menanganinya. Pada tahun 1995 disepakatilah *the Code of Conduct for Responsible Fisheries* atau yang lebih dikenal dengan singkatan CCRF. CCRF merupakan sebuah kesepakatan yang menjadi acuan dalam pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib,

---

<sup>16</sup> Dewi Indira Biasane. *Kerja Sama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)*. (Jakarta: Pustaka UI. 2009) hal 3

<sup>17</sup> Wulan Dwi Oktari, "Pengaruh Kerjasama Indonesia dan Filipina Dalam Mengatasi Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Perbatasan Perairan Kedua Negara", hal 3. 2014. Universitas Riau. Diakses melalui <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/2234/2176> pada 19 Mei 2015

bertanggung jawab dan berkelanjutan dan kesepakatan ini dibentuk berlandaskan keputusan bersama yang telah disepakati oleh negara – negara anggota FAO.<sup>18</sup>

Namun dalam perjalanannya CCRF dinilai belum cukup sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya perikanan termasuk pencegahan dan penanggulangan IUU *fishing*. Oleh sebab itu dalam memerangi IUU *fishing* negara – negara anggota FAO sepakat merumuskan sebuah aksi internasional yang dituangkan dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU fishing* (IPOA-IUU *fishing*) pada tahun 2001. IPOA-IUU *fishing* merupakan aksi global yang bertujuan mencegah kerusakan sumber daya perikanan dan membangun kembali sumber daya perikanan yang telah atau hampir punah, sehingga kebutuhan pangan yang bersumber dari perikanan bagi generasi saat ini dan akan datang tetap terjamin ketersediaannya. IPOA-IUU *fishing* tersebut harus ditindaklanjuti oleh setiap negara di dunia, termasuk Indonesia dengan menyusun rencana aksi pencegahan dan penanggulangan IUU *fishing* di tingkat nasional.<sup>19</sup>

Indonesia merupakan negara yang ikut serta dalam kesepakatan mengenai IPOA-IUU *fishing* yang diprakarsai oleh FAO tersebut dan menunjukkan komitmen untuk melawan *illegal fishing* yang sangat merugikan negara ini. Sebagai bentuk implementasi kesepakatan tersebut dan menyadari bahwa sulitnya melawan IUU *fishing* jika dilakukan Indonesia tanpa melakukan kerjasama, selanjutnya Indonesia dan Australia menyetujui *joint regional action* yang merupakan cara terbaik dalam

---

<sup>18</sup> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012.

<sup>19</sup> Ibid hal 1.



mengatasi permasalahan ini. Kerjasama ini tentu dimaksudkan untuk meminimalisir pengeluaran negara dan kesulitan negara – negara menerapkan penegakan hukum dalam upaya memerangi nelayan yang melakukan praktik penangkapan ikan ilegal.<sup>20</sup> Kerjasama bilateral ini pun menumbuhkan untuk niat bekerjasama lebih lanjut demi memerangi kasus IUU *fishing*. Bali pada tanggal 4 Mei 2007 Indonesia, Australia, Brunai Darussalam, Kamboja, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste dan juga Vietnam sepakat untuk membentuk *Regional Ministerial Meeting (RMM) Promoting Responsible Fishing Practices in the Region*<sup>21</sup>. RMM ini menghasilkan 2 dokumen yaitu *Joint Ministerial Meeting* dan juga *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region*.<sup>22</sup>

RPOA-IUU *fishing* yang diikuti oleh 11 negara ini merupakan aksi yang menuntut kesadaran negara masing – masing yang tergabung dalam kerjasama ini untuk mempromosikan praktik penangkapan ikan yang lebih bertanggung jawab. Tujuan RPOA adalah untuk meningkatkan dan memperkuat manajemen penangkapan ikan di regional ini, demi menjaga ketersediaan ikan serta sekaligus menjaga

---

<sup>20</sup> APEC Fisheries Working Group, *Assessment of Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific* (Singapura: Asia-Pacific Economic Cooperation Secretariat. 2008) Hal 53.

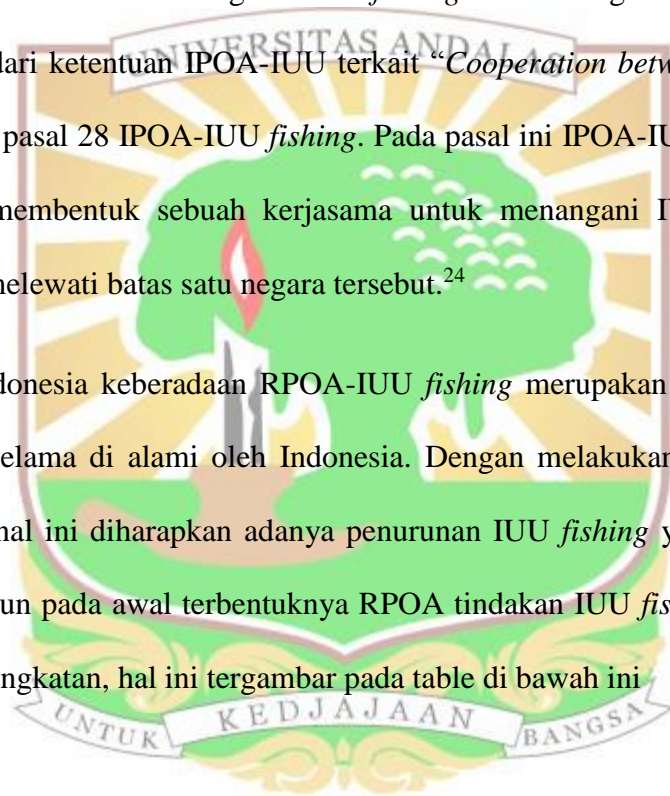
<sup>21</sup> Sinarharapan.co.id, "Sepuluh Negara Sepakat Perangi Penangkapan Ikan Ilegal". Diakses melalui <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/05/eko03.html> pada 4 Maret 2016.

<sup>22</sup> Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan, *Refleksi 2008 dan Outlook 2009* (Jakarta: DKP. 2008).

lingkungan laut, dan untuk mengoptimalisasi keuntungan dari pengaplikasian praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab.<sup>23</sup>

RPOA-IUU *fishing* selaku rezim regional merupakan turunan dari rezim internasional yang sudah ada sebelumnya yaitu IPOA-IUU *fishing* dan merupakan salah satu tuntutan yang diberikan oleh IPOA-IUU kepada tiap negara di dunia untuk saling bekerjasama dalam menangani IUU *fishing*. Rezim regional ini merupakan bentuk adopsi dari ketentuan IPOA-IUU terkait “*Cooperation between States*” yang dijelaskan pada pasal 28 IPOA-IUU *fishing*. Pada pasal ini IPOA-IUU menuntut agar setiap negara membentuk sebuah kerjasama untuk menangani IUU *fishing* yang sudah bersifat melewati batas satu negara tersebut.<sup>24</sup>

Bagi Indonesia keberadaan RPOA-IUU *fishing* merupakan salah satu solusi masalah yang selama di alami oleh Indonesia. Dengan melakukan kerjasama antar negara di regional ini diharapkan adanya penurunan IUU *fishing* yang dialami oleh Indonesia. Namun pada awal terbentuknya RPOA tindakan IUU *fishing* di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini tergambar pada table di bawah ini



<sup>23</sup> Joint Ministerial Statement, Regional Ministerial Meeting on Promoting Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region, Bali, Indonesia, 04 May 2007, paragraph 5: RPOA-IUU *fishing*.

<sup>24</sup> Naskah IPOA-IUU *Fishing* pasal 28 ayat 1-8, Diakses melalui <http://www.fao.org/docrep/003/y1224e/y1224e00.htm> pada 2 April 2016.

Tabel 1.1 Persentase Kapal yang Melakukan Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPPRI) Tahun 2006 Hingga September 2008

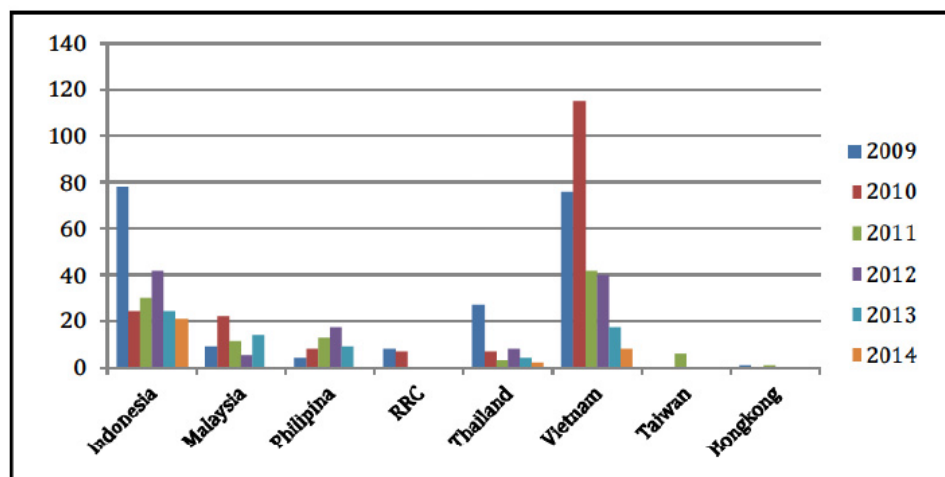
Status Kapal	Persentase Jumlah Kapal yang Melakukan Penangkapan Ikan Ilegal		
	2006	2007	Jan – Sep 2008
Kapal Berbendera Indonesia	6,2	4,8	6,8
Kapal Berbendera Asing	45,4	42,0	83,8

Sumber: Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (P2SDKP-DKP RI).

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada setiap 100 kapal yang berbendera Indonesia yang diperiksa, hanya sekitar 6 atau 7 buah kapal yang diduga melakukan IUU *fishing*. Sedangkan 100 kapal asing yang diperiksa, 83 hingga 84 kapal terbukti melakukan tindakan penangkapan ilegal. Dari tabel di atas juga dapat dilihat praktik penangkapan ikan secara ilegal dari tahun 2007 hingga September 2008 meningkat

41,8%, hal ini tidak berimbang karena pada tahun 2006 hingga 2007 angka penangkapan IUU *fishing* hanya turun 3,4%.<sup>25</sup> Namun di lain pihak data yang paling baru menunjukkan adanya penurunan tindakan penangkapan ilegal hal ini dapat dilihat dari grafik 1.2 di bawah ini.

Grafik 1.2 Tangkapan Kapal Pengawas Berdasarkan Bendera/ Kebangsaan Kapal Tahun 2009 hingga 2013



Sumber: *Data Pokok Kelautan Dan Perikanan 2014*. Pusat Data Statistik Dan Informasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Dengan melihat grafik di atas dapat dilihat bahwa bukan hanya kapal nelayan lokal saja yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pelanggaran di wilayah Indonesia namun juga terdapat beberapa negara tetangga lainnya yang juga tertangkap melakukan pelanggaran. Kapal berbendera Vietnam paling banyak masuk wilayah perairan Indonesia dan ditangkap sebanyak 62,84 persen (115 kapal) pada tahun 2010 dan Hongkong merupakan negara asing yang paling sedikit melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia yaitu hanya 2 kapal pada rentang waktu 2009

<sup>25</sup> Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan. Refleksi 2008 dan Outlook 2009. Jakarta: DKP, 2008.

hingga 2014. Namun grafik di atas menunjukkan adanya penurunan jumlah kapal yang tertangkap melakukan IUU *fishing* dan tentu saja RPOA juga berperan terhadap hal ini.<sup>26</sup>

Aksi pencegahan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan merupakan dampak dari adanya kerjasama perbatasan untuk mencegah IUU *fishing* yang lebih ditingkatkan setelah adanya RPOA. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlu adanya sebuah kerjasama regional untuk mencegah kejahatan ini karena IUU *fishing* sudah tidak dapat ditangani secara pribadi. Implementasi RPOA menjadi penting dan berdampak positif bagi pencegahan IUU *fishing* di masing – masing negara di regional ini khususnya Indonesia. Namun pada data yang telah dijabarkan tetap adanya turun naik jumlah angka penangkapan IUU *fishing* di Indonesia sehingga hal ini menunjukkan masih adanya masalah terhadap penanganan kejahatan ini meskipun dengan adanya RPOA. Untuk menjelaskan pergerakan yang tidak konsisten tersebut perlulah melihat bagaimana implementasi RPOA itu sendiri di Indonesia sehingga dapat dilihat alasan di balik turun naiknya angka penangkapan Ilegal tersebut.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Dampak yang dihasilkan oleh IUU *fishing* tidak dapat dikesampingkan lagi bagi pemerintah Indonesia baik melihat dari sektor ekonomi, sosial dan lingkungan, sehingga perlu adanya sebuah langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia demi menyelamatkan sektor perikanan tangkap Indonesia dari IUU *fishing* ini.

---

<sup>26</sup> Pusat Data Statistik Dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Data Pokok Kelautan Dan Perikanan 2014* (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. 2014) hal 107.



Penurunan angka penangkapan kapal laut yang melakukan aksi IUU *fishing* merupakan salah satu dampak positif yang diraih oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan implementasi RPOA merupakan sebuah langkah yang dinilai benar. Bagaimana RPOA berdampak kepada penanganan IUU *fishing* di Indonesia haruslah dilihat melalui pengimplementasian RPOA-IUU *fishing* dalam semua sektor yang terpengaruh oleh rezim tersebut. Apa saja perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia setelah mengikuti RPOA baik kebijakan, undang – undang, serta hubungan diplomatik Indonesia kepada negara anggota RPOA serta *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) sesuai dengan poin – poin yang tercantum dalam RPOA. Oleh sebab itu penelitian ini pada akhirnya akan membahas bagaimana implementasi RPOA berdampak kepada perubahan kebijakan, undang – undang serta kerjasama internasional Indonesia demi menangani IUU *fishing* di wilayah Indonesia.

### 1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang akan menjadi pertanyaan penelitian di dalam kajian ini adalah: *bagaimanakah implementasi RPOA dalam menangani IUU fishing di Indonesia?*

### 1.4 TUJUAN PENELITIAN

Dari latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan RPOA sebagai rezim yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan IUU *fishing* di Indonesia

## 1.5 MANFAAT PENELITIAN

- a. Sebagai pengalaman penelitian bagi penulis serta menambah ilmu penulis sendiri terlebih lagi menjadi salah satu referensi dalam studi – studi yang berkaitan dengan isu
- b. Diharapkan dapat menjadi studi yang bermanfaat bagi khalayak ramai

## 1.6 STUDI PUSTAKA

Untuk menjadikan penelitian ini baik dan sesuai dengan keilmuan, tentu saja penulis harus merujuk ke beberapa jurnal, buku, *website* dan sumber – sumber terkait lainnya yang sesuai dengan tulisan ini. lebih jelasnya penelitian ini akan merujuk kepada penelitian tentang sektor maritim khususnya yang terkait dengan IUU *fishing*, RPOA, dan penelitian – penelitian yang terkait dengan penanganan IUU *fishing*.

Penelitian pertama yang akan dijadikan referensi dalam penelitian ini ialah tesis dari Dewi Indira Biasane yang berjudul “Kerjasama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal : Studi Kasus Praktik Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”. Dalam tesisnya Dewi Indira Biasane menjelaskan bahwa rezim Internasional memiliki peran dalam upaya menanggulangi praktik penangkapan ikan ilegal melalui kerangka regional *RPOA to promote responsible fishing practices, including combating illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing in the region*. Akan tetapi dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa RPOA-IUU *fishing* dinilai belum berperan

maksimal dikarenakan belum adanya variabel penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).<sup>27</sup>

Tesis ini merupakan salah satu sumber informasi utama terkait rezim ataupun perikanan yang juga merupakan dua hal yang akan dibahas oleh peneliti. Yang membedakan ialah rentang tahun yang dilihat oleh Biasane yang fokus pada tahun 2007 hingga 2008 sedangkan penulis sendiri akan menambah batas penelitian hingga tahun 2016.

Tulisan lainnya yang dijadikan studi pustaka bagi tulisan ini adalah buku yang berjudul “Ekologi Politik Nelayan” karya Arif Satria. Buku ini menjabarkan bagaimana kondisi perikanan Indonesia dari era Presiden Soeharto hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu penjabaran kebijakan – kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan di masing – masing era pemerintahan juga dijelaskan dengan cukup baik. Buku ini menjelaskan bagaimana perikanan bukanlah sesuatu sektor yang dianggap prioritas bagi pemimpin – pemimpin negara ini tergambar dari kurang perhatiannya kepada sektor ini baik dukungan berupa revisi undang – undang maupun kebijakan – kebijakan yang efektif.<sup>28</sup> Masalah – masalah yang terjadi di sektor perikanan di Indonesia diakibatkan oleh bentuk kebijakan yang bersifat terpusat dan tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal. Untuk menyelesaikan persoalan – persoalan kelautan diperlukan partisipasi aktif pada semua sektor yang bersentuhan dengan sektor ini, tidak hanya pemerintah namun perlu

---

<sup>27</sup> Dewi Indira Biasane. *Kerja Sama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)*. (Jakarta: Pustaka UI. 2009) hal 93.

<sup>28</sup> Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan* (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang. 2009) Hal 86.

adanya perubahan dan partisipasi dari LSM atau organisasi yang berfokus di dunia perikanan, pasar atau swasta, serta masyarakat itu sendiri. Dengan adanya pengaruh dan partisipasi pada semua sektor diatas, masalah – masalah lama yang terjadi karena tidak adanya kerjasama antar aktor tersebut akan terselesaikan.<sup>29</sup>

Lebih lanjut tulisan ini juga membahas bagaimana adanya globalisasi perikanan di dunia. Masyarakat internasional sangat memperhatikan bagaimana kondisi perikanan dunia saat ini, baik ikan itu sendiri maupun kondisi alam atau kondisi laut itu sendiri. Dengan kondisi alam yang sudah mulai rusak dan banyak terjadinya *over fishing*, perlu adanya upaya konservasi yang mendunia. Buku ini juga menjelaskan bagaimana dunia perikanan Internasional sangat ketat saat ini dengan ditetapkan IPOA – IUU dan terbentuknya RFMO – RFMO yang sangat menjaga kondisi alam dan juga perikanan di dunia. Menurut tulisan ini Indonesia juga diserang dengan isu – isu tersebut dan juga berperan aktif dalam globalisasi perikanan dengan turut serta bergabung dengan RFMO – RFMO tersebut seperti IOTC, CCSBT dan beberapa RFMO lainnya. Dengan turut sertanya Indonesia dalam globalisasi perikanan tentu juga harus ada perubahan dan penyesuaian terhadap kebijakan – kebijakan perikanan lokal serta pengertian yang diharapkan dari berbagai sektor hingga masyarakat.<sup>30</sup> Pada akhirnya buku ini menjadi penting bagi penulis disebabkan oleh penjabaran kondisi perikanan dunia dan Indonesia yang sangat berguna bagi tulisan ini.

---

<sup>29</sup> Ibid hal 87 – 90.

<sup>30</sup> Ibid hal 186 – 193.

Selanjutnya tulisan ini akan menggunakan buku karya Syamsumar Dam yang berjudul “Politik Kelautan”. Buku ini membahas mengenai bagaimana perkembangan penilaian yang terjadi oleh negara – negara terhadap sektor kelautan di dunia. Dikarenakan kepentingan nasional masing – masing negara, sering kali terjadi perselisihan mengenai kelautan yang disebabkan pada awalnya tidak adanya peraturan yang universal terhadap sektor ini.<sup>31</sup>

Masalah pertama yang muncul ialah bagaimana hak mengenai kepemilikan laut. Pandangan pertama yang muncul ialah pandangan dimana laut merupakan hak bersama seluruh umat manusia atau *res communis omnium*. Pandangan ini berasal dari bangsa romawi yang menguasai laut tengah di masa kejayaannya. Pandangan kedua yang muncul ialah *res nullius* yang menganggap laut tidak ada yang memiliki oleh sebab itu siapa pun dapat menguasai laut dan dapat pula memilikinya dengan mendudukinya berdasarkan konsepsi *occupatio*.<sup>32</sup>

Setelah membahas bagaimana perkembangan pemikiran tentang kepemilikan laut serta masalah – masalah yang terkait kelautan dan juga perkembangan peraturan – peraturan mengenai kelautan, buku ini lebih spesifik membahas masalah – masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia serta kepentingan Indonesia terhadap sektor kelautan. Isu negara kepulauan, pengamanan pelayaran di selat Malaka, kepentingan ekonomi politik Indonesia di Natuna dan peran Indonesia pada *Bali Road Map* 2007 serta *Manado Ocean Declaration* 2009 merupakan bahasan – bahasan yang lebih

---

<sup>31</sup> Syamsumar Dam, *Politik Kelautan* (Jakarta: Bumi Aksara. 2010) Hal 1 – 3.

<sup>32</sup> Ibid hal 4.



fokus melihat sisi Indonesia di dalamnya. Isu – isu yang juga sering menimbulkan masalah seperti politik kelautan di kawasan Asia-Pasifik dan konflik Laut Cina Selatan juga dibahas oleh penulis.

Penelitian ini mengambil persepsi – persepsi yang Syamsumar Dam bangun mengenai politik kelautan. Bukan hanya mengenai peraturan – peraturan mengenai kelautan, perikanan juga ikut dibahas di dalam buku ini. buku ini dijadikan salah satu studi pustaka karena banyaknya data – data yang cukup berguna terkait isu yang akan peneliti bahas di dalam buku, khususnya politik kelautan dan juga penjabaran peraturan serta kerjasama Indonesia di sektor maritim.

Bagian terakhir penulis juga mengambil jurnal dari *Environmental Justice Foundation* yang berjudul “*PIRATES & PROFITEERS: How Pirate Fishing Fleets are Robbing People and Oceans*”. Dalam jurnalnya EJF menjabarkan bagaimana pengaruh IUU yang begitu besar di dunia Internasional saat ini bahkan mempengaruhi nelayan – nelayan kecil. Melihat dari aktivitasnya saat ini, *Illegal*, *unreported* dan *unregulated* (IUU) *fishing* dapat juga diklasifikasikan menjadi *transnational crime* karena aktivitasnya yang bukan lagi dilakukan oleh nelayan lokal di wilayah negaranya sendiri namun sering kali nelayan asing melanggar batas – batas negara dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Environmental Justice Foundation (EJF), *Pirates And Profiteers - An International Campaign Against Illegal Fishing* (London: The Environmental Justice Foundation. 2005) Hal 3 – 4.

Berdasarkan jurnal EJJ terdapat 4 penyebab kegiatan IUU *fishing* sering terjadi yaitu:<sup>34</sup>

1. *Flags of convenience* adalah tindakan yang dilakukan pihak penangkap ikan yang memanfaatkan regulasi yang ada pada sebuah negara sebagai penutup kegiatan IUU *fishing* nya
2. *Monitoring control and surveillance*. Tindakan MCS memang sangat diperlukan demi mengawasi kegiatan menangkap ikan. Usaha akan mengalami hambatan ketika kegiatan menangkap ikan berada di wilayah ZEE hal terjadi karena besarnya biaya yang perlu dikeluarkan dalam melakukan kegiatan MCS.
3. *Ports of convenience* adalah sebuah izin dan akses yang didapatkan oleh nelayan pelaku IUU dari sebuah negara karena lemahnya pengawasan. Maksudnya adalah bagaimana nelayan tetap mendapatkan kebutuhannya seperti minyak dan suplai yang mereka butuhkan, ditambah lagi mereka juga bisa menjual hasil IUU *fishing* karena tidak adanya pengawasan yang cukup baik dari pihak pelabuhan
4. *Transshipment* adalah pola pemindahan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan di tengah laut ke kapal – kapal yang akan menjemput hasil tangkapan itu untuk di kirim ke darat

Dengan mengetahui 4 masalah umum yang terjadi terkait dengan kegiatan IUU *fishing*, perlu adanya tindakan penanganan yang sesuai dengan masalah –

---

<sup>34</sup> Ibid hal 9 – 14.

masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Jurnal ini menjadi sangat penting dikarenakan penjabaran data yang tidak ada di studi pustaka sebelumnya serta adanya ide baru terkait sumber masalah IUU *fishing* yang menjadi topik penelitian bagi penulis.

Disertasi oleh M. Brans yang berjudul “*Domestic Implementation of International Regimes in Developing Countries: The Case of Marine Fisheries in China*” dijadikan acuan selanjutnya bagi penulis dalam meneliti implementasi RPOA. Disertasi ini membahas bagaimana implementasi rezim internasional demi menangani masalah – masalah perikanan maritim yang ada di Cina. Brans menggunakan kerangka pemikiran rezim, *europeanization*, dan kebijakan untuk menganalisa bagaimana implementasi rezim perikanan internasional yang telah diratifikasi oleh Cina dan mengamati perubahan yang terjadi pada negara yang dalam tulisannya dianggap negara berkembang jika dikaitkan dalam isu ini.<sup>35</sup>

Selanjutnya Brans hanya melihat *output* dan *outcome* sebagai bahan penelitiannya untuk dapat lebih memahami bagaimana perubahan kebijakan dan undang – undang yang terjadi di negara tersebut.<sup>36</sup> Sedangkan dalam kajian ini selain melihat *output* dan *outcome* yang diberikannya, penulis juga fokus melihat peran negara dalam mengimplementasikan rezim disini maksudnya adalah RPOA. Perbedaan yang mencolok adalah terkait subjek negara penelitian yang penulis pilih dengan M Brans yang mana dalam penelitiannya mengambil objek penelitian China

---

<sup>35</sup> Brans, M, *Domestic Implementation of International Regimes in Developing Countries: The Case of Marine Fisheries in China* (Belgium: Catholic University Leuven, 2010). Hal 15.

<sup>36</sup> Ibid Hal 45.

sedangkan penulis sendiri memilih Indonesia sebagai objek kajian, namun hal ini tidak mengurangi pentingnya data – data yang ada di dalam disertasi tersebut.

## **1.7 KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1.8.1 REZIM INTERNASIONAL**

Rezim akan menghasilkan peraturan internasional yang diproduksi dalam bentuk program yang harus diimplementasikan. Selain itu, rezim juga akan mempengaruhi implementasi domestik di berbagai bidang sehingga haruslah dianggap sebagai sebuah variabel independen. Rezim juga harus dibedakan dengan program internasional berdasarkan penjabaran rezim yang telah dijelaskan oleh Krasner. Untuk mendukung hal tersebut Volker Rittberger mengatakan bahwa<sup>37</sup>:

*“regimes are not a regimes if they have not reached a certain level if effectiveness”*

Menurut Krasner, rezim merupakan sebuah kumpulan dari prinsip, norma, peraturan dan prosedur pengambilan keputusan, yang mana merangkul kepentingan para aktor dalam area tertentu dalam konteks hubungan internasional.

---

<sup>37</sup> Andresen, S., Skjoerseth, J. B., and Wettestad, J “Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments”,(Laxenburg: Working Paper, International institute for Applied Systems Analysis. 1995) hal 26.

*“Regime can be as sets of implicit or explicit principles, norm, rules, and decision making procedure around which actor’s exportations coverage in a given area of international relations”<sup>38</sup>*

Prinsip adalah kepercayaan akan fakta, sebab akibat, dan standar moral. Norma adalah standar perilaku yang diaplikasikan dalam bentuk hak dan kewajiban. Peraturan adalah perintah dan larangan. Sedangkan prosedur pengambilan keputusan maksudnya adalah kebiasaan yang dominan dalam memuat dan mengimplementasikan pilihan bersama.<sup>39</sup>

RPOA dapat dikatakan rezim internasional jika memiliki unsur – unsur yang telah dijelaskan melalui studi mengenai rezim yang telah dilakukan. Sebagai rezim international RPOA memiliki prinsip, norma, peraturan dan prosedur pengambilan keputusan yang harus dihargai dan diusahakan oleh setiap anggota yang tergabung di dalamnya. Selain itu unsur – unsur yang ada di dalam RPOA tersebut merupakan hasil dari kesepakatan yang harus dihormati oleh semua anggota. Dengan adanya unsur – unsur yang telah disepakati RPOA sebagai rezim internasional haruslah diimplementasikan di dalam peraturan nasional masing – masing negara agar tujuan untuk memberantas IUU *fishing* dapat direalisasikan.

---

<sup>38</sup> Stephen D Krasner, *International Regime* (United State of America: Cornell University Press, 1983) hal 1.

<sup>39</sup> *ibid*



### 1.8.2 IMPLEMENTASI

Pada dasarnya, rezim berfungsi untuk dapat memfasilitasi pembuatan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan untuk menghindari struktur anarki dan iklim “*each against all*”.<sup>40</sup> Sehingga seperti yang dijelaskan dalam bagian rezim internasional, implementasi rezim internasional dalam kebijakan nasional dianggap perlu untuk dapat menanggulangi masalah yang sedang dihadapi bersama. Dengan demikian RPOA sebagai rezim internasional perlu diimplementasikan dalam kebijakan nasional sehingga tujuan untuk dapat menanggulangi IUU *fishing* dapat dicapai.

Menurut Riant Nugroho implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.<sup>41</sup> Lebih lanjut lagi pada, umumnya isu implementasi dianggap sebagai konteks dari kebijakan publik nasional saja, sehingga oleh sebab itu implementasi dapat diartikan sebagai aksi nyata dari kebijakan yang diambil oleh pihak terkait dan bertujuan untuk meraih target sesuai dengan yang telah diputuskan oleh kebijakan tersebut.<sup>42</sup> Sehingga implementasi diartikan sebagai fungsi untuk meraih objektif yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan, output dan outcome merupakan hasil dari proses tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Dewi Indira Biasane. Kerja Sama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) (Jakarta: Pustaka UI. 2009) hal 16.

<sup>41</sup> Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2014) hal 657.

<sup>42</sup> Brans, M, *Domestic Implementation of International Regimes in Developing Countries: The Case of Marine Fisheries in China* (Belgium: Catholic University Leuven, 2010). Hal 39.

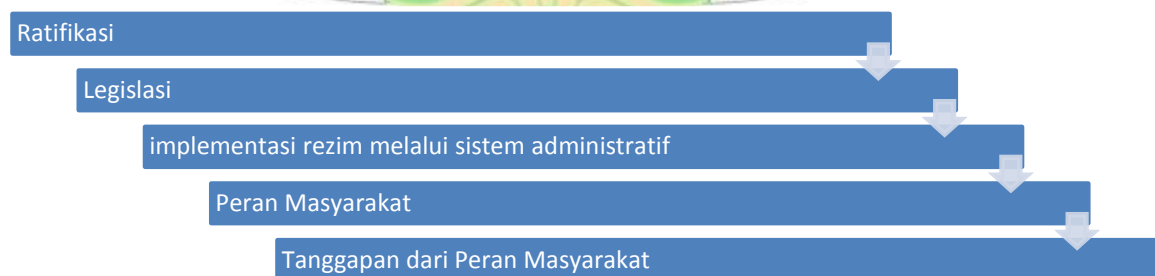
<sup>43</sup> Ibid hal 40.

Dalam *"Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments"* Steinar Andresen mengatakan implementasi merupakan proses konversi program internasional yang merupakan hasil dari sebuah *"consensus of government"* yang berakibat kepada perubahan kebiasaan dari target grup. Maksud dari konsensus di sini adalah persetujuan yang telah disepakati oleh negara – negara anggota dan negara – negara tersebut jugalah yang merupakan target grup dari implementasi. Konsensus dari implementasi tersebut harus sekurang kurangnya memenuhi satu dari dua kriteria:<sup>44</sup>

- konsensus mengenai isi program; dan/atau
- konsensus prosedur pengambilan keputusan yang mewajibkan negara untuk mengimplementasi program yang telah disetujui sebelumnya.

Setelah menjelaskan mengenai pengertian implementasi, Andresen membagi implementasi rezim menjadi 5 fase. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam bagan sederhana dibawah ini

Diagram 1.3 Fase – Fase Implementasi



<sup>44</sup> Andresen, S., Skjoerseth, J. B., and Wettestad, J *"Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments"*, (Laxenburg: Working Paper, International institute for Applied Systems Analysis. 1995) hal 27 – 28.

Fase pertama adalah sebuah negara melakukan ratifikasi atau menerima program internasional. Fase selanjutnya negara perlu mengaplikasikan komitmen internasional yang telah diratifikasi sebelumnya kedalam legislasi nasional atau keputusan administratif. Pelaksanaan program nasional melalui sistem administratif merupakan fase ketiga dari implementasi. Ketiga fase ini termasuk kedalam kategori *output* dan menunjukkan usaha negara dalam implementasi rezim melalui sistem administratif. Fase keempat adalah hubungan antara regulator dan juga target grup dan tanggapan grup tersebut terkait regulasi. Fase keempat ini merupakan *outcome* dari implementasi rezim. Fase terakhir adalah konsekuensi dari tanggapan oleh target grup atau perubahan kebiasaan target grup, dan fase ini merupakan *impact* dari implementasi rezim menurut Andresen. Andresen membatasi penelitian hanya hingga fase *outcome* karena kedua fase inilah yang merupakan studi implementasi, *impact* merupakan studi dari *problem-solving effectiveness*.<sup>45</sup>

Setelah keluaran rezim telah di implementasikan pada masing – masing negara Andresen membagi implementasi menjadi 2 level yaitu *high level implementation* dan juga *low level implementation*. Level – level implementasi tersebut dipengaruhi oleh 3 indikator yaitu:

1. *Political will*. hal ini mengenai kepentingan sebuah negara, apakah kepentingan negara sebuah negara dapat berubah karena implementasi dari rezim

---

<sup>45</sup> ibid hal 27.

2. Kemampuan negara untuk mengimplementasikan rezim. Hal ini berhubungan dengan kontrol negara terhadap organisasi administrasinya dan juga target group sosial
3. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses implementasi misalnya teknologi

Dengan menggunakan pendapat dari Steinar Andresen tersebutlah penelitian ini akan menjelaskan implementasi RPOA dan mengidentifikasi langkah – langkah terkait RPOA sesuai dengan empat fase yang telah disampaikan oleh Andresen sebelumnya. Serta dengan menghubungkan ketiga indikator yang disampaikan oleh Andresen diatas kedalam implementasi RPOA di Indonesia, penelitian ini juga diharapkan dapat menarik kesimpulan bagaimana implementasi RPOA IUU *fishing* di Indonesia baik *high level* maupun *low level implementation*.

## **1.8 METODOLOGI**

### **1.8.1 BATASAN PENELITIAN**

Fokus penelitian ini akan mengarah kepada bagaimana keadaan perikanan Indonesia semenjak pemerintah Indonesia menyetujui RPOA yaitu pada tahun 2007 hingga tahun 2016. Periode ini dipilih sebagai batasan penelitian karena pada tahun 2007 RPOA ditetapkan dan Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen di dalamnya, sedangkan jarak yang ditetapkan hingga 2016 bermaksud untuk melihat dampak dari RPOA hingga akhir penelitian skripsi ini dilakukan. Sehingga dalam periode tahun tersebut akan dilihat bagaimana perubahan kebijakan lokal Indonesia

yang disesuaikan dengan nilai – nilai yang ada dalam RPOA serta diolah dengan menggunakan konsep Hubungan Internasional yang akan digunakan oleh peneliti.

Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan juga untuk mencari jawaban. Atau dalam arti yang lain metodologi merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.<sup>46</sup>

Peneliti akan menggunakan metode kualitatif sebagai dasar dalam menganalisa skripsi. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai sebuah fenomena sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang saling bergantung dan mengandung kompleksitas.<sup>47</sup> Dengan menggunakan metode penelitian ini penulis mengharapkan pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena yang akan dibahas oleh peneliti yaitu terkait dengan IUU *fishing*, Indonesia, dan RPOA.

### **1.8.2 TINGKAT ANALISIS DAN UNIT ANALISIS**

Dalam penelitian ini penulis perlu menetapkan unit dan tingkat analisis sebagai landasan penelitian. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah dalam kajian ini, maka unit analisisnya atau objek yang perilakunya akan dianalisis yaitu maraknya IUU *fishing* di Indonesia sedangkan unit eksplanasinya adalah implementasi RPOA di Indonesia. Kemudian tingkat analisis yakni unit yang menjadi landasannya yaitu negara Indonesia.

---

<sup>46</sup> DR. Deddy Mulyana, MA. *Methodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001).

<sup>47</sup> Sanaprah Faisal, *Format – Format Penelitian Sosial, Dasar – Dasar dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Persada. 1995) Hal 20.



### **1.8.3 TEKNIK DAN JENIS PENGUMPULAN DATA**

Data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *secondary data* yaitu data terpercaya yang telah terlebih dahulu dikumpulkan oleh peneliti lain. Data ini didapat dari situs-situs *shareholder* yang terlibat, situs-situs utama yang akan dijadikan sumber informasi yaitu situs Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, situs-situs media masa nasional, serta situs-situs lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis juga akan menggunakan referensi dari penelitian-penelitian, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel dan berbagai situs ilmiah yang dibutuhkan.

### **1.8.4 TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan seleksi sumber-sumber data yang relevan terhadap isu yang diteliti dan sesuai dengan tujuan penelitian, selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian maka analisis yang digunakan sesuai dengan konsep dari penelitian ini yaitu rezim dan implementasi di mana menganalisis RPOA sebagai rezim internasional yang perlu diimplementasikan pada sektor domestik.

Dalam melihat implementasi RPOA di Indonesia yang dilihat melalui berbagai perubahan pada Undang – Undang serta kebijakan negara Indonesia, maka peneliti akan menggunakan konsep implementasi yang dijabarkan oleh Steinar Andresen terbagi ke dalam 4 indikator yang mana indikator-indikator ini akan menjadi dasar dalam menganalisis data.

Maka dengan analisis ini dapat menjawab pertanyaan penelitian dan dapat mendeskripsikan RPOA sebagai mekanisme rezim internasional dan pengimplementasiannya di Indonesia yang dibatasi dari awal Indonesia meratifikasi RPOA pada tahun 2007 dan dilanjutkan hingga tahun 2016

## **1.9 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Bab I Pendahuluan**

Bab 1 berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran (teori dan konsep), metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II Keadaan *Illegal Unregulated Unreported fishing* di Indonesia**

Pada Bab ini peneliti akan membahas lebih rinci mengenai keadaan perikanan Indonesia baik terkait keadaan ketersediaan ikan dan jumlah IUU *fishing* di Indonesia

### **Bab III *Regional Plan Of Action* sebagai rezim regional yang mengatur penanganan *Illegal Unregulated Unreported fishing***

Pada Bab ini peneliti akan menjabarkan lebih lanjut bagaimana RPOA itu sendiri serta bagaimana nilai – nilai yang terkandung di dalam RPOA yang seharusnya diimplementasi oleh setiap negara yang telah menyetujuinya. Serta melihat perubahan kebijakan dan Undang – undang di Indonesia yang tentu saja semua harus terkait dengan RPOA.

#### **Bab IV implementasi *Regional Plan Of Action* di Indonesia sebagai rezim dalam menghadapi *Illegal Unregulated Unreported fishing***

Pada Bab ini peneliti akan mengaitkan isu yang diambil dengan teori dan konsep yang telah peneliti tentukan sebelumnya dan selanjutnya menjelaskan isu sesuai dengan teori dan konsep tersebut.

#### **Bab V Penutup dan Kesimpulan**

Bab ini berisi ringkasan penelitian penulis dan kesimpulan yang diraih setelah melakukan penelitian yang didasari pada jawaban perumusan masalah yang diangkat

